

## KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RENAH SUNGAI BESAR KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Dian Eko Saputra<sup>1</sup> Muchlis Hamdi<sup>2</sup> & Hyronimus Rowa<sup>3</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Cilandak-Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi: dianekosaputra790@gmail.com

Diterima: 12-03-2022

Disetujui: 13-05-2022

Diterbitkan: 15-06-2022

### ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah melihat Kinerja Aparatur perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Renah Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Renah Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Penelitian menggunakan teori oleh Agus Dwiyanto terkait indikator Kinerja, kemudian melakukan analisis SWOT dan *litmus test* Osborne dan Plastrik untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Renah Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Renah Besar belum Maksimal. Masih terdapat kekurang dalam produktifitas, kualitas pelayanan, dan Responsibilitas kegiatan yang dihasilkan, dikarenakan masih kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya finansial yang terbatas serta infrastruktur dan perlengkapan yang terbatas.

**Kata Kunci:** Kinerja Aparatur Desa, Pengelolaan Dana Desa, Desa

### ABSTRACT

*The focus of this research is to look at the Performance of Village Apparatus in the management of Village Funds in Sungai Renah Besar Village, Limbur Lubuk Mengkuang District, Bungo Regency, and determine strategies that should be carried out to Improve Village Apparatus Performance in Village Fund Management in Sungai Renah Besar Village, Limbur Lubuk Mengkuang District. The research uses theory by Agus Dwiyanto related to performance indicators, then conducts a SWOT analysis and Osborne and Plastric litmus tests to determine strategies. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. In collecting data, researchers conducted observations, interviews and collected documents about the performance of Village Apparatus in Village Fund Management in Sungai Renah Besar Village. The results showed that the Village Apparatus Performance in Village Fund Management in Sungai Renah Besar Village was not optimal. There is still a lack of productivity, service quality, and responsibility for the resulting activities, due to the lack of competence and expertise of village officials in managing the Village Fund. Then the availability of limited human resources, limited financial resources and limited infrastructure and equipment.*

**Keywords:** *Village Apparatus Performance, Village Fund Management, Village.*



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki banyak persoalan dalam kehidupannya, salah satunya yakni masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang paling nyata pada Negara berkembang adalah mengenai kemiskinan. Pemerintahan sadar persoalan kemiskinan adalah persoalan yang memiliki dampak serius, Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Secara geografis, Indonesia memiliki dua wilayah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yakni wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perdesaan, untuk itu persoalan kemiskinan di perdesaan harus memiliki bentuk kebijakan dan pengelolaan yang tepat agar angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dilakukan di dua wilayah yakni perkotaan dan perdesaan. Namun, kondisi pembangunan di wilayah perdesaan memiliki angka yang rendah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 wilayah desa yang terpetakan secara administrasi berjumlah 74.093 desa (BPS, 2019). Pembangunan desa telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, sehingga desa sebagai subyek pembangunan perlu diukur perkembangannya. RPJMN ini merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan resmi rencana Pembangunan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Targetnya, mengurangi jumlah Desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah Desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Rancangan strategis Pembangunan Desa ini sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dimensi yang menyeluruh.

Pembangunan desa mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Desa Renah Sungai Besar tergolong memiliki Dana Desa yang rendah dibandingkan oleh desa-desa yang lain. Walaupun Dana Desa yang tidak besar dalam wilayah kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Desa Renah Besar harus memiliki bentuk pengelolaan dana desa yang baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Dana Desa yang baik berdampak pada pembangunan Desa yang baik pula, serta juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Renah Sungai Besar. Rendahnya kinerja perangkat desa dalam mengelola dana desa akan berdampak buruk terhadap pembangunan desa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, maka perangkat desa harus memiliki peran strategis dalam membangun Desa dengan cara mengelola Dana Desa sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa masing-masing. Pembangunan desa yang tidak tercapai hanya akan

menimbulkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, sehingga perlunya pembangunan desa yang baik untuk mensejahterakan masyarakat desa. Namun, tingkat pembangunan desa baik atau buruk juga bergantung pada bagaimana sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut, dalam hal ini perangkat desa.

Dari latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kinerja perangkat desa yang diwujudkan dengan judul “Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Di Desa Renah Sungai Besar, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi”.

Sebagai wujud pelayanan publik, pemerintah memiliki fungsi pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. Prawirosentono dalam Sinambela (2012:5) mendefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Selanjutnya Robbins and Coulter (2007) menjelaskan bahwa “*Performance is the end result of an activity, managers are concerned with organizational performance the accumulated end results of all the organization’s work activities*”. Sedangkan Steers & Mowday sebagaimana dikutip oleh Jackofsky (1984) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas karena (1) keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan (2) individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya (Christine, 2010:123).

Membahas kinerja tentu tidak terlepas dari pencapaian hasil yang telah dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prawirosentono (1992:2) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Agus Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Produktivitas; Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas Layanan; Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
- c. Responsivitas; Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

- d. **Responsibilitas**; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
- e. **Akuntabilitas**; Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya Sedarmayanti (2007:319) menjelaskan mengenai indikator kinerja karyawan diantaranya adalah:

1. **Kualitas kerja** (*quality of work*); adalah kualitas kerja yang di capai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat.
2. **Kehadiran dan tepat waktu** (*Promptness*); yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan.
3. **Inisiatif**; Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab.
4. **Kemampuan**; Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.
5. **Komunikasi**; Interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang di hadapi.

Selanjutnya Kasmir (2014:208) juga menjelaskan mengenai indikator kinerja sebagai berikut “untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa indikator mengenai kriteria kinerja yakni; kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan pengawasan, dan hubungan antar perseorangan. Indikator inilah yang akan menjadi patokan dalam mengukur kinerja karyawan Adapun penjelasan dari masing-masing dimensi atas adalah sebagai berikut”

1. **Kualitas (mutu)**; Pengukuran kinerja dapat dilakukan dari dengan pekerjaan melihat yang kualitas (mutu) dihasilkan melalui Dari suatu proses tertentu. proses atau hasil dari kesempurnaan. Penyelesai Makin sempurna suatu kegiatan mendekati suatu titik baik,

- produk, demikian maka pula kinerja aliknyajika makin kualitas pekerjaan yang dihasilkan rendah maka kinerjanya juga rendah maka kinerjanya juga rendah. Dalam praktiknya kualitas suatu pekerjaan dapat dilihat dalam nilai tertentu Untuk mengukur kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat dari kuantitas (jumlah) dihasilkan oleh seseorang. Dengan kata lain
2. Kuantitas (jumlah); kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam bentuk satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Biasanya untuk pekerjaan tertentu sudah ditentukan kuantitas yang dicapai. Pencapaian kuantitas yang diharapkan adalah jumlah yang sesuai dengan target atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.
  3. Waktu (jangka waktu); Untuk jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ada pekerjaan batas waktu minimal dan maksimal yang harus dipenuhi (misalnya 30 menit). Jika melanggar atau tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka dapat dianggap kinerjanya kurang baik, demikian pula sebaliknya. Dalam arti yang lebih luas ketepatan waktu merupakan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk jenis pekerjaan tertentu makin cepat suatu pekerjaan terselesaikan, makin baik kinerjanya demikian pula sebaliknya makin lambat penyelesaian suatu pekerjaan, maka kinerjanya menjadi kurang baik.
  4. Penekanan biaya; Biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan. Artinya dengan biaya yang sudah dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. Jika pengeluaran biaya melebihi anggaran yang telah ditetapkan maka akan terjadi pemborosan, sehingga kinerjanya dianggap kurang baik demikian pula sebaliknya, Oleh karena itu, perlakukan efektivitas biaya di seluruh bidang pekerjaan yang memiliki anggaran biaya. Biaya yang dikeluarkan biasanya untuk biaya tetap, biaya variabel atau biaya semi variabel. Biaya ini berkaitan untuk pengeluaran bagi sumber daya, seperti biaya produksi, teknologi, bahan baku atau biaya lainnya.
  5. Pengawasan; Hampir seluruh jenis perkerjaan perlu melakukan dan memerlukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan. Pada dasarnya situasi dan kondisi selalu berubah dari keadaan yang baik menjadi tidak baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, setiap aktivitas pekerjaan memerlukan pengawasan sehingga tidak melenceng dari yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka setiap pekerjaan akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan melakukan pengawasan karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya dan jika terjadi penyimpangan akan memudahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan perbaikan secepatnya. Artinya pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan aktivitas karyawan agar tidak meleset dari yang sudah direncanakan atau ditetapkan. Suatu pekerjaan tanpa dilakukan pengawasan akan memengaruhi kinerja seseorang. Yang pasti tanpa pengawasan maka hasil kerja sudah dapat dipastikan akan memberikan hasil yang tidak baik bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan.
  6. Hubungan antar karyawan; Penilaian kinerja sering kali dikaitkan dengan kerja sama atau kerukunan antar karyawan dan antar pimpinan Hubungan ini sering kali juga dikatakan sebagai hubungan antar perseorangan. Dalam hubungan ini diukur apakah seorang karyawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerja sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Hubungan antar perseorangan akan menciptakan suasana yang nyaman dan kerja sama yang memungkinkan satu sama lain saling mendukung untuk menghasilkan aktivitas pekerjaan yang lebih baik. Hubungan antar karyawan ini merupakan perilaku kerja yang dihasilkan seorang karyawan.

Penjelasan di atas menegaskan mengenai kinerja yang merupakan suatu hasil capaian yang didapatkan oleh pelaksana yang mendapatkan wewenang yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada. Untuk itu, Sebagaimana dalam penelitian ini fokus pada Kinerja Perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa, maka peneliti menggunakan indikator kinerja yang sudah di jelaskan oleh Dwiyanto ( 2015: 180-192) di atas untuk menjawab permasalahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menurut L.R Gray dalam Sumanto (2014:4) adalah “penggunaan metode ilmiah secara formal dan sistematis untuk menjawab dan menyelesaikan masalah”. Menurut Nazir (2014:70) dijelaskan bahwa “penelitian adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku”. Kemudian menurut Hussey dalam Silalahi (2010:2) mengatakan bahwa “penelitian sebagai suatu proses penyelidikan, sistematis dan metodis, sebagai solusi atas suatu masalah dan meningkatkan pengetahuan”.

Suatu penelitian ilmiah harus memenuhi 4 (empat) kriteria menurut Gulo (2010:17) adalah sebagai berikut: 1) Penelitian dilakukan secara sistematis. Prosesnya dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap tahap harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melangkahi tahap sebelumnya untuk langsung pada tahap terakhir atau tahap yang jauh di atasnya; 2) Penelitian dilakukan secara terkendali. Perumusan konsep dan hipotesis secara operasional merupakan kendali dalam mengarahkan seluruh kegiatan penelitian; 3) Penelitian dilakukan secara empiris. Masalah-masalah yang akan diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Semua konsep yang tercakup dalam penelitian harus terhubung secara operasional dalam dunia nyata; 4) Penelitian bersifat kritis. Kritis disini berarti ada tolak ukur yang dipakai untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima, baik secara eksplisit maupun implisit; 5) Gulo (2010:99) menyatakan bahwa “penyusunan desain penelitian dilakukan setelah peneliti menetapkan judul penelitian yang akan dilaksanakan, desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologi”. Desain penelitian sebagaimana dimaksudkan para peneliti di atas adalah sebagai langkah awal dari seseorang yang akan mengadakan penelitian.

Menurut Effendy (2010:117) bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Selanjutnya menurut Creswell (2014:4) dijelaskan penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Whitney dalam Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena”.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu proses penjajakan atau penggalan suatu permasalahan secara mendalam dan komprehensif dari kumpulan informasi yang pada akhirnya bertujuan untuk menggambarkan permasalahan dan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, kemudian secara eksploratif untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur Perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Renah Sungai Besar.

## PEMBAHASAN

Dalam memperoleh data-data Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, peneliti menggunakan model pendekatan Kinerja yang dirumuskan oleh Dwiyanto sebagai berikut:

### Produktivitas

Produktivitas adalah bagian dari salah satu hal yang dijadikan untuk mengukur kinerja Perangkat Desa di Desa Renah Sungai Besar dalam pengelolaan dana desa. Riyanto menjelaskan bahwa, (1986: 22) secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Berdasarkan yang di sampaikan oleh Kepala Desa Renah Sungai Besar Tobri pada tanggal 25 september 2020 mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang sudah terlaksana alhamdulillah sudah ada yang terwujudkan, secukupnya lah anggaran tersebut kita buat kegiatan berdasarkan dengan yang dibutuhkan masyarakat yang bersumber dari dana desa menghasilkan 2 kegiatan pembangunan fisik berupa drainase dan turap selebihnya dana desa kita anggarkan ke dalam pembiayaan Bumdes”. Mengenai kendala itu pasti ada, dalam perencanaannya tentu kita melibatkan masyarakat, usulan mereka tidak bisa kita okomodir semua karena hanya beberapa yang dapat kita laksanakan berdasarkan yang memang sedang diperlukan saja, tapi alhamdulillah selesai lah meskipun sedikit mengganggu pelaksanaannya.”

Produktivitas dipemerintah Desa Renah Sungai Besar ini masih rendah. Karena Pemerintah Desa belum dapat menampung aspirasi masyarakat dengan tepat terhadap pertimbangan pemilihan kegiatan. Hal ini senada yang disampaikan oleh zulkifli selaku Sekretaris Desa Renah Sungai Besar pada tanggal 25 September 2020 menyampaikan bahwa “Dana yang kita terima itu kan tidak semua langsung di gunakan, karena bertahap dalam jangka beberapa waktu yang ditentukan, sehingga penggunaannya memang kita laksanakan dengan sebaiknya dari aspirasi beberapa masyarakat tentunya berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam perbub, dengan dana yang terbatas kita tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang diusulkan dengan menggunakan dana desa, palingan kita prioritaskan mana yang lebih penting, kemudian dengan adanya masa realisasi pencairan jeda waktu, tentu

membuat pekerjaan kita sedikit terganggu, karena dana yang turun tidak semua langsung cair, jadi bertahap, ya harus sabar lah dalam penyelesaiannya yang cukup memakan waktu sampai pada penetapannya”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai warga yang di sekitar bangunan drainase dan turap dengan bapak solihin pada tanggal 25 september 2020 menyampaikan bahwa “Pengerjaannya lumayan ini makan waktu pak, katanya menggunakan dana desa, kami juga tidak tahu apa yang menyebabkan pengerjaannya makan waktu lama, kalau mengenai bangunannya lumayanlah pak, tapi dak terlalu nian lah berdampak ke kami”. Berdasarkan informasi dari informan dan pengamatan langsung memang pemanfaatan pelaksanaan dana desa masih kurang menyentuh masyarakat langsung dampaknya, karena di ketahui kondisi Desa tersebut tidak semua berada di pinggiran sungai, dan kondisi sungai tidak terlalu besar.

### **Kualitas Layanan**

Dalam pemerintahan, kualitas layanan merupakan prioritas yang menjadi perhatian dalam melaksanakan tugas pokok, fungsinya, sehingga Pemerintahan yang baik akan terwujud, begitu juga di Pemerintahan Desa harus memberikan layanannya yang terbaik dalam pelaksanaan tugasnya, apalagi terkait dengan penggunaan Dana yang semakin besar jumlahnya didapatkan di setiap Desa, sebagaimana yang terjadi di Desa Renah Sungai Besar berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pemdus pada tanggal 26 september menyampaikan bahwa “Pelayanan di desa dalam kecamatan Limbur lubuk mengkuang pada umumnya memang masih dalam keadaan manual, salah satunya di Desa Sungai Renah Besar yang masih melaksanakan sistem manual dalam perencanaannya, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, semua, perkembangan yang signifikan belum ada, kita juga memaklumi terhadap apa yang dilaksanakan, karena keterbatasan dari pendidikan itu menjadi salah satu faktor penyebabnya”.

Perkembangan teknologi secara langsung sangat berdampak sekali terhadap sistem pelayanan yang ada dalam pemerintahan, tidak terkecuali dalam Pemerintahan Desa yang akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai hal pelayanan yang akan di dapatkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan informasi dari kepala Desa Tobri pada tanggal 25 september 2020 menyampaikan bahwa. “di desa kami masih menggunakan sistem lama dalam pelaporan dengan secara manual, perencanaan, pelaporan, semua masih dalam keadaan manual, publikasi belum ada yang menyentuh ke digital, adalah berupa spanduk pemberitahuan kegiatan, alat-alat dalam kantor juga masih terbatas, Maklumlah di Desa kita masih banyak yang tamatan SMA”.

Sementara itu peneliti mewawancarai salah satu tokoh adat yang ada di Desa sungai renah besar Abdul manaf pada tanggal 26 september 2020 menyampaikan “Macam-macam itulah kualitas pelayanannya, belum ada yang istimewa lah. Kadang tahu dari mulut ke mulutlah mengenai kegiatan yang nak di buat Desa, sesekali pak Kades nyampaikan di pengajian dan pertemuan yang di adakan dirumah warga, nyampaikan yang nak di buat sama pelaporan dana. Penggunaan berbasis teknologi belum, jadi dak semua warga mengetahui kegiatan yang nak dibuat”.

Pendidikan aparatur desa sungai renah besar menjadi salah satu penyebab dari kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, keterbatasan alat, dan sumberdaya manusia

### **Responsivitas**

Adalah kemampuan pegawai pemerintah Desa untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program – program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa. Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik. maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan.

Untuk itu peneliti mewawancarai salah satu warga di desa sungai renah besar Padli pada tanggal 25 September 2020 menyampaikan bahwa: “Lumayan lah perangkat desa merespon dari keinginan kita sebagai warga desa, mereka cukup mendengarkan dengan baik menampung aspirasi kami, tapi kendalanya terbatas pada momen-momen tertentu saja seperti pengajian dan kumpul-kumpul warga, paling yang menyampaikan sebatas pemuka-pemuka Desa yang ada, apalagi jarak tempuh dari dusun ke dusun lumayan jauh tapi ini kan seharusnya warga Desa semuanya bisa menyampaikan keinginan mereka terhadap kemajuan Desa dan kebutuhan yang diperlukan di lapangan, semoga ke depan Pegawai Desa bisa memfasilitasi”.

Selanjutnya peneliti menkonfirmasi perihal tersebut kepada Kepala Desa Sungai Renah Besar Bapak Tobri pada tanggal 25 September 2020 menyampaikan bahwa: “Akses kita memang belum ada secara efektif dan efisien dalam menampung aspirasi masyarakat dalam mengusulkan pendapat dan saran mereka terhadap pembangunan dan pemberdayaan Desa, kita langsung jemput bola mendatangi mereka dalam bentuk acara-acara warga, pengajian, diskusi ringan, kemudian kita jug mintak pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang di anggap mewakili, dan juga kita kan ada BPD yang menyerap aspirasi setiap dusun-dusun yang ada di lingkungan Desa, memang kita. Responsivitas dari perangkat Desa yang baik tentu akan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga kinerja mereka dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah Desa.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu anggota BPD Bapak Rasul selaku ketua BPD Sei. Renah Besar pada tanggal 26 september 2020 menyampaikan bahwa: Tugas kita menyampaikan dan mengawal apa yang menjadi keinginan dari warga kita ke pemerintah desa, kadang ada warga yang langsung datang menemui menyampaikan ide dan usulan, karena memang akses terbatas dalam menyampaikan, jarak dan medan juga jadi kendala, jadi cukup di wakikan saja dengan kami selaku BPD saya agar menyampaikan ke kepala desa untuk tidak bisa mengakomodir semua masyarakat untuk bisa langsung bertatap muka, tetapi kedepan akan kita tingkatkan cara-cara yang dapat menampung aspirasi masyarakat”.

Responsivitas Mengacu kepada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut semakin baik. Berdasarkan informasi dari informan dan data di atas bahwa dapat di simpulkan mengenai responsivitas Desa Sungai renah besar masih butuh perbaikan dalam meanmpung aspirasi masyarakat Desa, agar semua bisa menerima dan mendengar apa yang akan di lakukan oleh Pemerintah Desa

### **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Berdasarkan informasi dari Kabid Pemdes Bapak Willy pada tanggal 26 September mengatakan bahwa: Pada prinsipnya seluruh Desa harus melaksanakan kegiatan Dana Desa berdasarkan aturan yang sudah di tentukan, apabila terdapat masalah dan pelaksanaan tidak sesuai dengan prosedur, maka sanksi atas setiap pelanggaran sudah disiapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, untuk Desa Sungai Renah Besar khususnya pada tahu 2019 tidak ada ditemukan permasalahan yang menyangkut pengelolaan dana Desa, hanya terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporannya yang memakan waktu lama dari mereka”.

Kemudian informasi dari Kepala Desa Sungai Renah Besar Bapak M Tobri pada tanggal 25 september menyampaikan bahwa: “Semua keinginan dari masyarakat melalui BPD kita tampung dan kita kumpulkan, tapi tidak semua yang diserap tersebut dapat dilakukan, karena kan semua ada aturan dan peruntuan Dana Desa ini sudah ada ketentuan dan pos nya masing, seperti kegiatan”.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa melaksanakan kegiatan berdasarkan dari aspirasi dan di selaraskan dengan ketentuan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa upaya dari Pemerintah Desa dalam menyesuaikan aturan yang ada sudah berusaha untuk maksimal namun memang kendala dilapangan yang tidak bisa mengakomodir semua keinginan dari masyarakat. Selanjut nya Sekretaris Desa Bapak Daud pada tanggal 26 September Menyampaikan bahwa: “Alhamdulillah untuk Dana Desa tahun 2019 tidak ada permasalahan yang kita hadapi, semua berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, kita mintak saran dan pendapat juga dari orang kabupaten (PMD) karena oran itu yang lebih paham secara detail, dikoreksilah”. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilaksnakan oleh Aparatur Desa sungai renah besar berdasarkan informasi dari beberapa informan menunjukkan berusaha untuk berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Aspek akuntabilitas merupakan salah satu faktor dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam Sumaryadi (2010:180) disebutkan bahwa: Pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik diminta maupun tidak diminta kepada seluruh masyarakat. Osborne dan Plastrik dalam Sumaryadi (2010:180) dijelaskan bahwa “dalam penyelenggaraan pelayanan publik akuntabilitas merupakan satu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tobri selaku Kepala Desa Sungai Renah Besar pada tanggal 25 september 2020, bahwa: “Kita beserta perangkat Desa Lainnya pastinya bertanggungjawab memberikan yang terbaik terhadap pengelolaan Dana Desa yaitu dengan melaksanakan kegiatan dan program ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kab. Bungo, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pembiayaan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rasul selaku Ketua BPD Desa Renah Sungai Besar tahun 2019 menyampaikan, bahwa “semua penggunaan, pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan di Desa khususnya Dana Desa yang diberikan dilaksanakan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama-sama, tentunya semua ini berdasarkan pada aturan yang berlaku, yaitu kegiatan di anggarakan berdasarkan saringan usulan dari masyarakat yang kita pilih berdasarkan aturan dan ketentuan”.

Berdasarkan dari berbagai informasi berdasarkan informan dan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian penyelenggaraan pengelolaan dana desa di Desa Sungai Renah Besar sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 1) Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo belum berjalan optimal. Dilihat dari aspek Produktivitas masih belum memuaskan, dari aspek Kualitas pelayanan masih belum memadai serta perlu perbaikan, dari aspek reponsivitas cukup berjalan baik namun perlu adanya peningkatan, selanjutnya responsibilitas dari Perangkat Desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan selanjutnya akuntabilitas dari pengelolaan dana desa sudah melaporkan realisasi kegiatan yang berdasarkan dengan aturan, namun masih kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur Desa Renah Sungai Besar membuat laporan tersebut masih perlu perbaikan. 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

di Desa Sungai Renah Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam aturan Permendes yang diperkuat dengan aturan Perbub Bungo, kemudian ketersediaan Anggaran yang diberikan berdasarkan dari kriteria status Desa dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana Desa namun anggaran tersebut tergolong kecil diantara desa yang lain dalam lingkup Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, ketersediaan personil Aparatur Desa Sungai Renah Besar akan tetapi personil tersebut masih di rasa kurang dalam menjalankan tugas, serta rendahnya Pendidikan yang dimiliki Perangkat Desa Renah Sungai Besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adisasmita, Raharjo. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 2014. *Perencanaan Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Handono, Eddie B. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- J, Lexy. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasmir, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia (teori & Prakti)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumanto, 2014. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS).

- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analaisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S dan Coulter, M. 2007, *Manajemen*. Edisi Kedelapan, Jakarta: PT. Indeks.
- Rusidi. 2006, *Metodologi Penelitian, Program Pascasarjana UNPAD*, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015, *Akutansi Desa, Panduam Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Wiratna V. Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*, Lapera Pustaka Utama.,Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadu Dkk. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokus Media

## Jurnal

- Neny Tri Indrianasari. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 1 No.2, Juli 2019.
- Sofiyanto dkk. 2016. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates*.
- Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller. 2009 *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks
- Pratiwi, R. dan Roekhudin, 2016. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 4 No.2*.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). *The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Riau, M. A. I. (2012). *Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. Medium*, 1(1).
- Riau, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). *Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riau, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). *Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Riau, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). *Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). *Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering*

*and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.*

Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro Semarang.

Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.

Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.